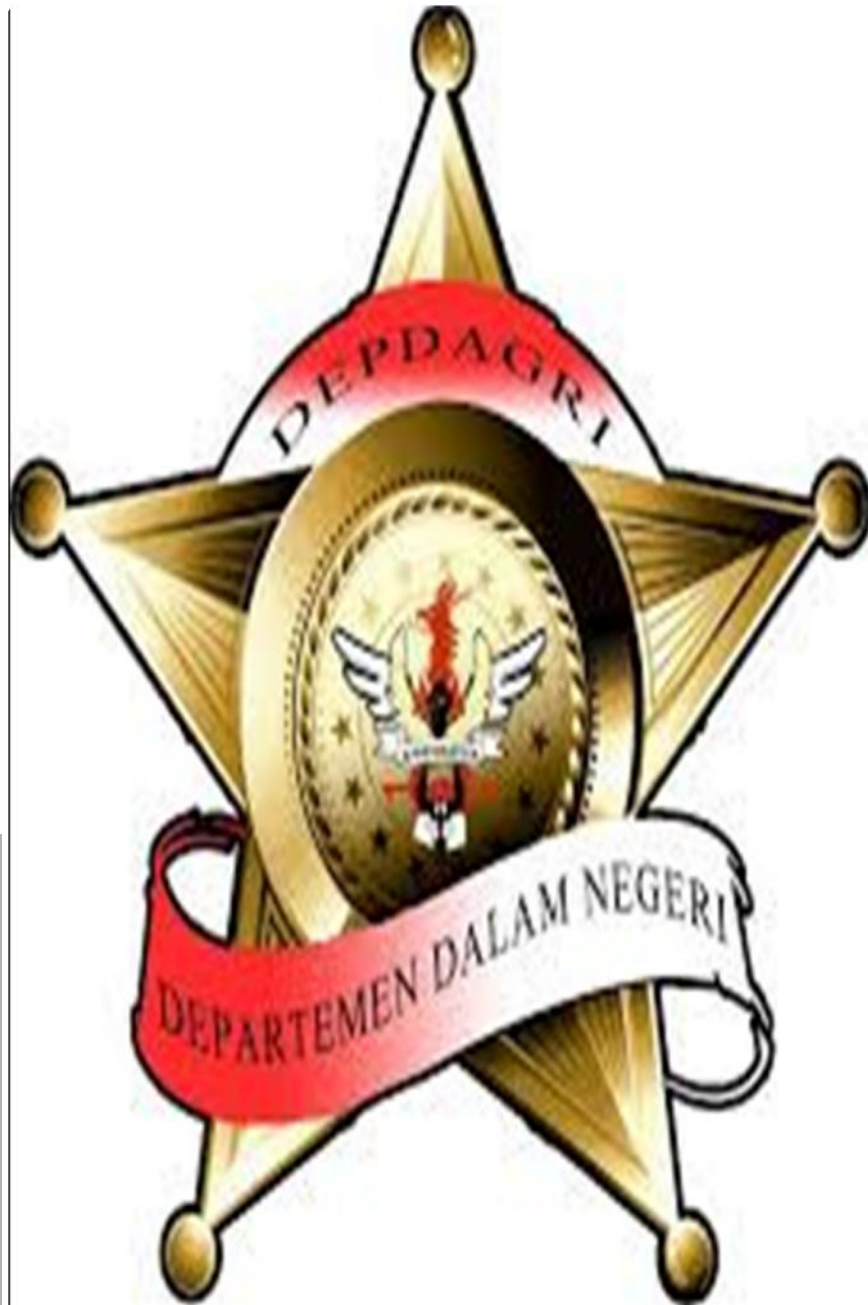


ANGGARAN SEKTOR PUBLIK (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.



PENYUSUNAN RKA PPKD



Penyusunan RKA PPKD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Copyright © 2016
bandi.staff.fe.uns.ac.id.

Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami Dasar hukum RKA PPKD
2. Memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)
3. Memahami Fungsi RKA PPKD
4. Memahami Komponen RKA PPKD
5. Memahami Tata Cara Pengisian Formulir RKA PPKD
6. Menelusur sumber acuan

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami Dasar hukum RKA PPKD

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RKA PPKD

- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami Dasar hukum RKA PPKD

JADWAL PENGANGGARAN

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD	s/d Maret
2	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Periode Maret s.d Medio Juni
3	Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD	Medio Juni
4	Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD	Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober
5	Penyusunan RKA SKPD	
6	Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD	
7	Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah	
8	Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung	
9	Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat	
10	Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung	Minggu I Oktober
11	Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD	Mg I – IV November
12	Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD	
13	Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi	(3 hari)
14	Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD	(15 hari)
15	Penyempurnaan hasil evaluasi	(7 hari)
16	Pengesahan Raperda APBD	Minggu IV Desember

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

2. Memahami APBD

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

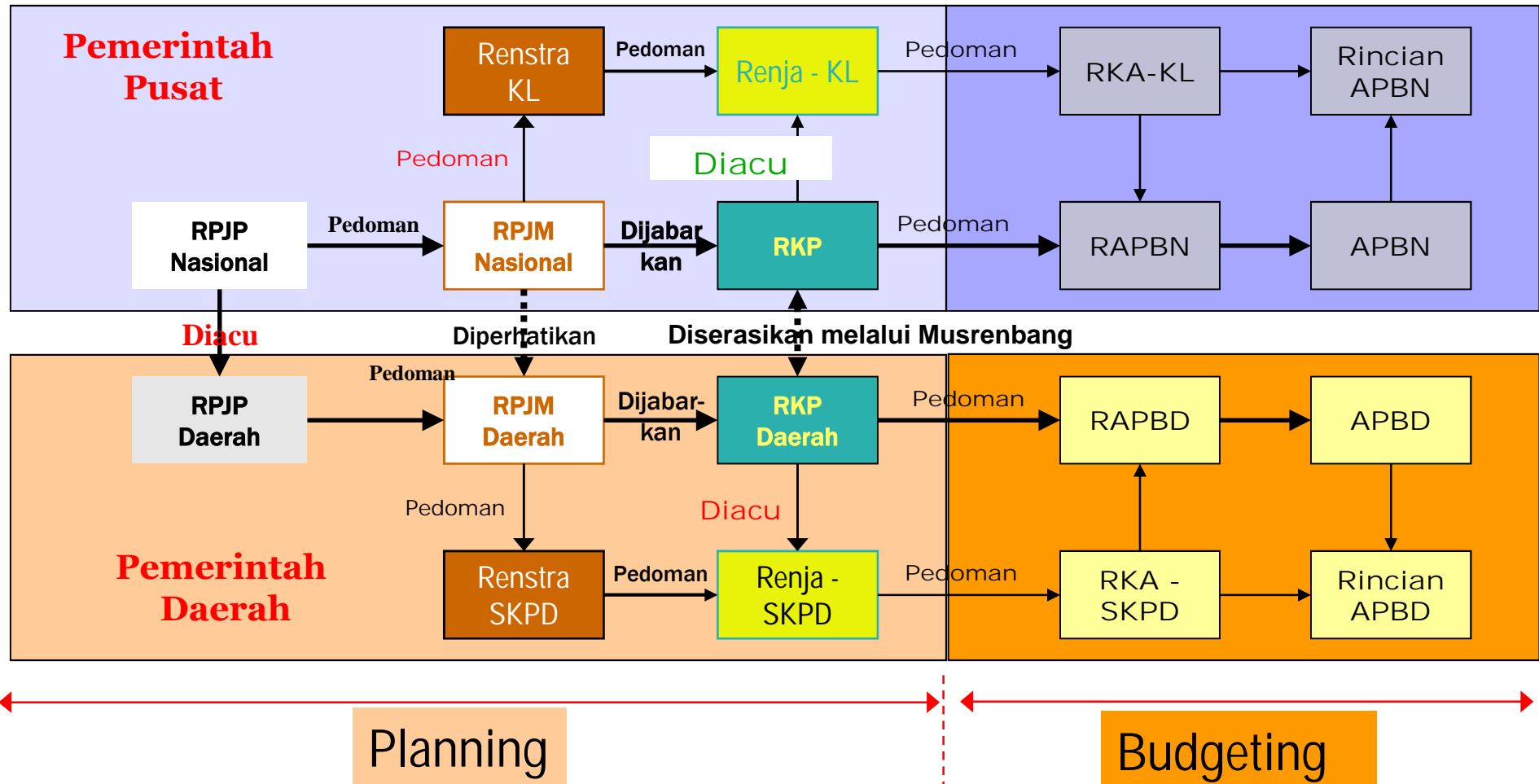
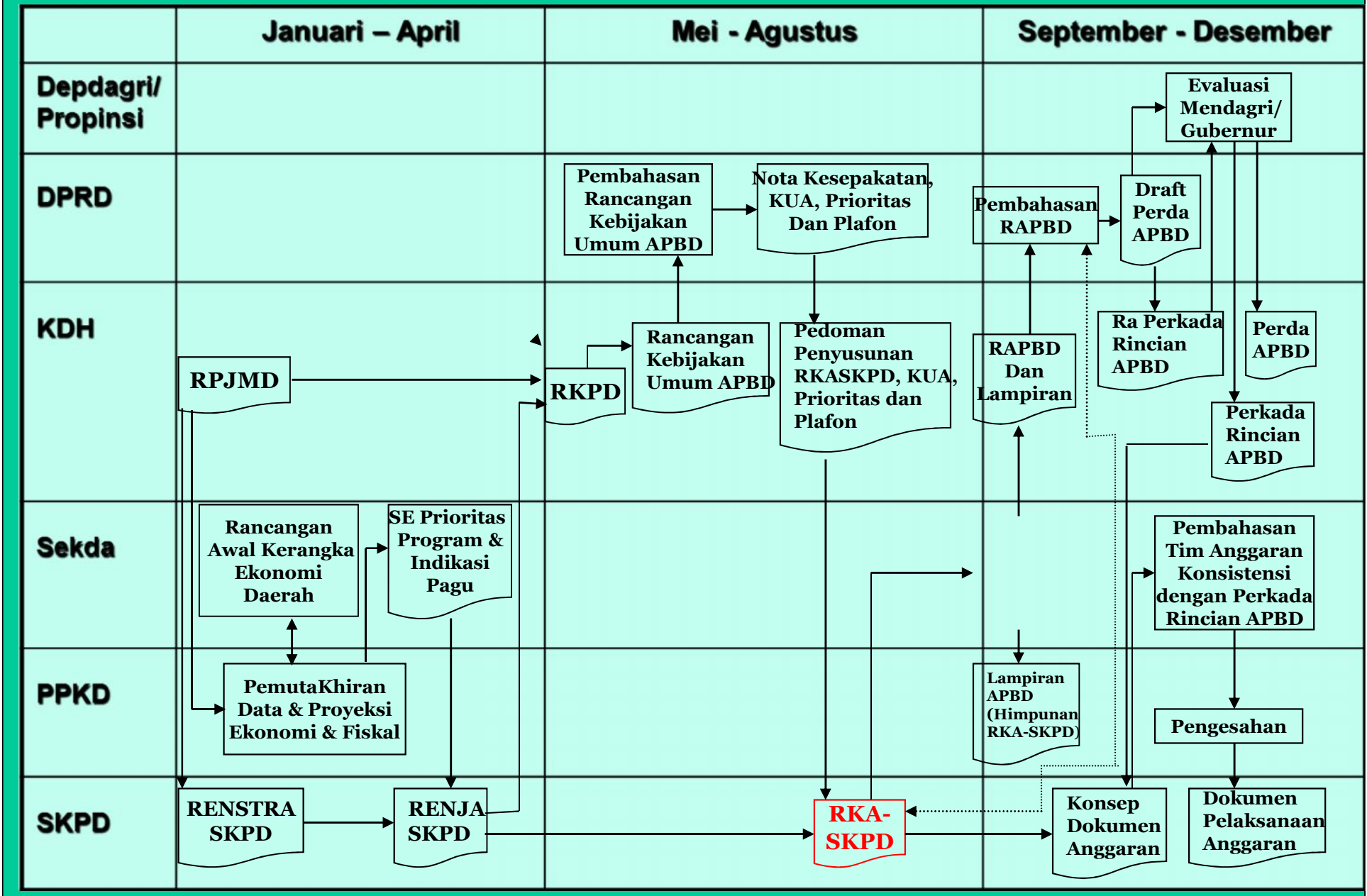


Diagram Proses Penyusunan Rancangan APBD



Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

2. Memahami APBD

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan
- Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-Lain PAD yang sah:

2. Dana Perimbangan

- Dana Bagi Hasil
- Dana Alokasi Umum
- Dana Alokasi Khusus

3. Lain-lain Pendapatan

- Hibah
- Dana Darurat

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

2. Memahami APBD

A. Pendapatan Daerah

Lain-lain PAD yang sah:

- Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- Jasa Giro
- Pendapatan Bunga
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- Komisi Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau Pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

B. Belanja Daerah

Diklasifikasikan Menurut

1. Organisasi

Disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah

2. Fungsi

- ❖ Pelayanan Umum;
- ❖ Ketertiban dan keamanan;
- ❖ Ekonomi;
- ❖ Lingkungan Hidup;
- ❖ Perumahan dan fasilitas Umum;
- ❖ Kesehatan
- ❖ Pariwisata
- ❖ Budaya
- ❖ Agama
- ❖ Pendidikan
- ❖ Perlindungan sosial

3. Program

Ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perencana Daerah berkordinasi dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan usulan Kepala SKPD

4. Kegiatan

Ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perencana Daerah berkordinasi dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan usulan Kepala SKPD

5. Jenis Belanja

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang/Jasa
- Belanja Modal;
- Bunga;
- Subsidi;
- Hibah;
- Bantuan Sosial;
- Belanja BH dan BK
- Belanja Tak Terduga

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

2. Memahami APBD

C. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

- Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah tahun sebelumnya;
- Penerimaan pinjaman daerah;
- Pencairan dana cadangan;
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- Pembayaran pokok hutang;
- Penyertaan Modal;
- Pemberian Pinjaman; dan
- Pembentukan Dana Cadangan.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

2. Memahami fungsi RKA PPKD

PPKD

Permendagri 59/ 2007

- SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) menyusun dua jenis RKA
 1. RKA SKPD dan
 2. RKA PPKD selaku BUD.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

2. Memahami fungsi RKA PPKD

PPKD

Permendagri 59/ 2007

- Kepala SKPKD memiliki dua kewenangan,
 - 1) sebagai Kepala SKPKD dalam kapasitas sebagai Kepala SKPD; dan
 - 2) sebagai PPKD yang sekaligus sebagai BUD.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

2. Memahami fungsi RKA PPKD

PPKD

Kepala SKPKD memiliki dua kewenangan,

- Sebagai contoh, di sebuah pemerintah daerah, fungsi SKPKD dilaksanakan oleh Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),
- maka DPPKAD akan menyusun dua set RKA yaitu:
 - 1) RKA-DPPKAD (sebagai SKPD) dan
 - 2) RKA PPKD (sebagai BUD).

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

2. Memahami fungsi RKA PPKD

RKA PPKD

1. RKA-PPKD digunakan untuk memuat anggaran sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan dana perimbangan dan hibah;
 - b. anggaran belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan
 - c. anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

2. Memahami fungsi RKA PPKD

RKA PPKD

- jenis anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang dituangkan di dalam RKA PPKD **tidak** sama dengan yang dituangkan di dalam RKA SKPD.
- anggaran pembiayaan, **hanya** dianggarkan di dalam RKA PPKD.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

3. Memahami Komponen RKA PPKD

PERBEDAAN ISI RKA SKPD VS RKA PPKD

No	Uraian	RKA SKPD	RKA PPKD
1	Anggaran Pendapatan	<ul style="list-style-type: none">• PAD	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan Dana Perimbangan dan Hibah (Lain-Lain Pendapatan yang Sah)
2	Anggaran Belanja Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none">• Belanja Tidak Langsung-<u>hanya</u> Belanja Pegawai	<ul style="list-style-type: none">• Belanja Tidak Langsung- <u>selain</u> Belanja Pegawai
3	Anggaran Belanja Langsung	<ul style="list-style-type: none">• Ada	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Ada
4	Anggaran Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none">• Ada

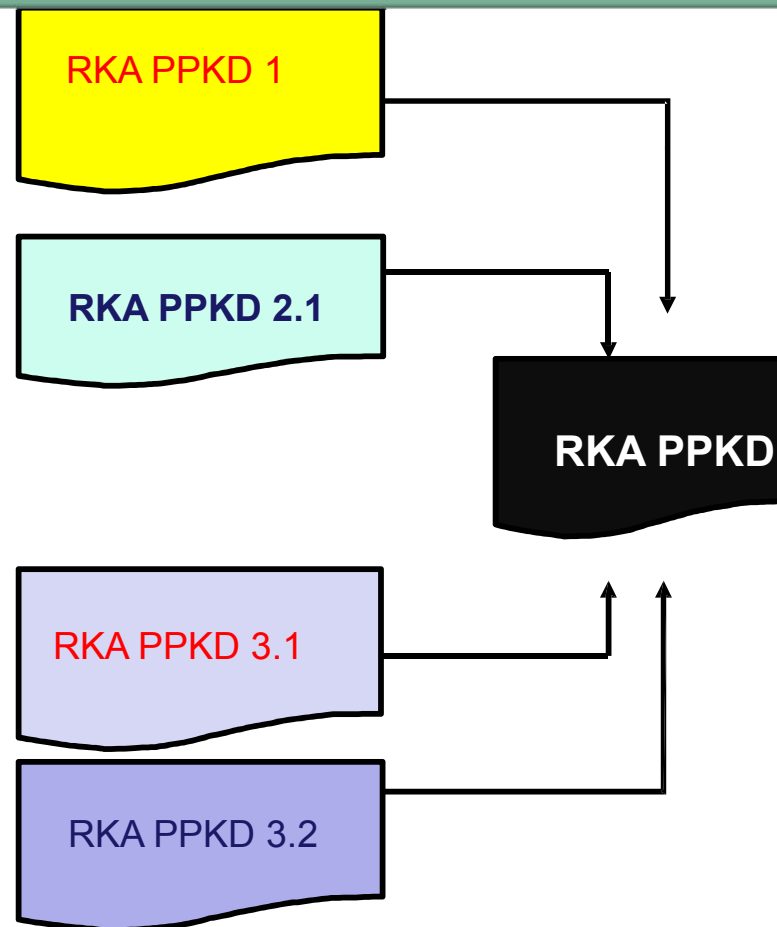
Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

3. Memahami Komponen RKA PPKD

BAGAN ALUR PENGGERJAAN RKA PPKD



KOMPONEN RKA PPKD

Penyusunan anggaran PPKD dituangkan ke dalam satu set RKA-PPKD yang terdiri dari:

- 1) RKA PPKD
 - Formulir ini merupakan Ringkasan Anggaran **Pendapatan** dan **Belanja** PPKD
- 2) RKA PPKD 1
 - Formulir ini merupakan rincian anggaran **pendapatan** PPKD
- 3) RKA PPKD 2.1
 - Formulir ini merupakan rincian anggaran **belanja tidak langsung** PPKD

KOMPONEN RKA PPKD

Penyusunan anggaran PPKD dituangkan ke dalam satu set RKA-PPKD yang terdiri dari:

4) RKA PPKD 3.1

- Formulir ini merupakan rekapitulasi rincian anggaran **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

5) RKA PPKD 3.2

- Formulir ini merupakan rincian anggaran **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

3. Memahami komponen RKA PPKD

KOMPONEN RKA PPKD

Langkah- langkah Penyusunan anggaran ke dalam RKA PPKD

- 1) mengisi RKA PPKD 1
- 2) mengisi RKA PPKD 2.1.
- 3) mengisi RKA PPKD 3.1
- 4) mengisi RKA PPKD 3.2.
- 5) menggabungkan/ meringkaskan anggaran yang dituangkan di dalam RKA 1, RKA 2.1., RKA 3.1, dan RKA 3.2. ke dalam RKA PPKD

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

4. Memahami Tata Cara Pengisian Formulir RKA PPKD

Kode	Informasi Pokok Dalam RKA PPKD
RKA PKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA PKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA PKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA PKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA PKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

FORMULIR PPKD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

Formulir RKA
- PPKD

Propinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3

.....,tanggal.....

PPKD (tanda tangan) (nama lengkap)

NIP.

FORMULIR PPKD 1

Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					Formulir RKA-PPKD 1
Propinsi/Kabupaten/Kota					
Tahun Anggaran ...					
Rincian Anggaran Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		volume	satuan	Tarif/ Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
X X X XX XX					
Jumlah					
<p>.....,tanggal.....</p> <p>PPKD</p> <p>(tanda tangan)</p> <p><u>(nama lengkap)</u></p> <p>NIP.</p>					
Keterangan :					

FORMULIR PPKD 1

.....,tanggal.....

PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
Dst				

FORMULIR PPKD 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						Formulir RKA PPKD 2.1
Propinsi/Kabupaten/Kota						
Tahun Anggaran ...						
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Tahun n				Tahun n+1
		volum e	satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
x x x xx xx						
Jumlah						
<p>.....,tanggal.....</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: center;"><u>(nama lengkap)</u></p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>						
Keterangan :						

FORMULIR PPKD 2.1

.....,tanggal.....

PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
Dst				

FORMULIR PPKD 3.1

Halaman.....

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					Formulir RKA - PPKD 3.1	
Propinsi/Kabupaten/Kota						
Tahun Anggaran						
Rincian Penerimaan Pembiayaan						
Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
1					2	3
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
					Jumlah Penerimaan	
<p>.....,tanggal.....</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p> <p style="text-align: center;">(tanda tangan)</p> <p style="text-align: center;"><u>(nama lengkap)</u></p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>						
Keterangan :						

FORMULIR PPKD 3.1

.....,tanggal.....

PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil
Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
Dst				

FORMULIR PPKD 3.2

Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					Formulir RKA - PPKD 3.2	
Propinsi/Kabupaten/Kota						
Tahun Anggaran						
Rincian Pengeluaran Pembiayaan						
Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
					Jumlah Pengeluaran	
.....,tanggal.....						
PPKD (tanda tangan)						
<u>(nama lengkap)</u> NIP.						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2. Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan		
1						
2						
Dst						

FORMULIR PPKD 3.2

Halaman

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH					Formulir RKA - PPKD 3.2	
Propinsi/Kabupaten/Kota						
Tahun Anggaran						
Rincian Pengeluaran Pembiayaan						
Kode Rekening					Uraian	Jumlah (Rp)
x	x	x	xx	xx		
x	x	x	xx	xx		
					Jumlah Pengeluaran	
.....,tanggal.....						
PPKD (tanda tangan)						
<u>(nama lengkap)</u> NIP.						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2. Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan		
1						
2						
Dst						

Referensi

Learning Objectives

6. Menelusur sumber acuan

- Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia.
- UU 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- Mulyana, Budi. 2010. Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan